

ANALISIS TIPOLOGI WILAYAH DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PERDESAAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

Oki Wijaya¹

¹Program Studi Agribisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: okiwijaya.umy@gmail.com / okiwijaya@umy.ac.id

PENDAHULUAN

Pembangunan secara umum dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2006). Sedangkan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan pelaksanaan pembangunan nasional pada suatu wilayah yang disesuaikan dengan kemampuan fisik dan sosial serta ekonomi dari wilayah tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pada hakekatnya pembangunan harus diarahkan kepada pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*) dan keberlanjutan (*sustainability*) (Rustiadi *et al.*, 2011).

Kebijakan pembangunan yang hanya bertumpu pada kemampuan sektoral, apabila ditinjau dari ekonomi wilayah akan menimbulkan dua permasalahan, dan tentunya hal ini tidak sesuai dengan hakekat pembangunan. Pertama, terjadinya disintegrasi struktur perekonomian dalam pengertian struktur perekonomian cenderung lebih berkembang dan terpusat pada satu wilayah saja. Jika hal ini berlangsung dalam jangka waktu panjang akan menimbulkan hubungan yang bersifat eksploitatif antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kedua, melemahnya potensi suatu wilayah untuk berkembang yang disebabkan kurang dimanfaatkannya keunggulan komparatif wilayah (*regional comparative advantage*) dan keunggulan kompetitif wilayah (*regional competitive advantage*) secara terpadu (Tarigan, 2009).

Dengan demikian, paradigma pembangunan wilayah saat ini perlu memperhatikan karakteristik wilayah yang dapat meningkatkan potensi wilayah tersebut dan tidak hanya sekedar memanfaatkan keunggulan komparatif tetapi juga mempunyai keunggulan kompetitif yang tinggi. Lebih lanjut seperti yang dikemukakan oleh Rustiadi *et al.*, (2006), pembangunan berbasis pengembangan wilayah dan lokal memandang penting keterpaduan antar sektor, antar spasial (keruangan), serta antar pelaku pembangunan di dalam maupun antar daerah, sehingga setiap program-program pembangunan sektoral dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah. Oleh karena itu menurut Rustiadi *et al.*, (2011), bahwa pengembangan wilayah atau pengembangan tata ruang wilayah perlu dimulai dengan menganalisis kondisi wilayah dan potensi unggulan yang ada di wilayah tersebut selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan strategi pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi masyarakatnya, potensi sumber daya alam serta ketersediaan prasarana wilayah dalam mendukung aktivitas perekonomian di wilayah tersebut. Pemilihan prioritas pembangunan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan

dengan berbagai dimensi yang diterapkan pada suatu wilayah sering menemukan kenyataan bahwa konsep tersebut memerlukan modifikasi atau penyesuaian ke arah karakteristik lokal.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut maka diperlukan suatu pengembangan wilayah pedesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka penelitian ini bertujuan untuk : 1) Menganalisis hirarki dan tingkat perkembangan kecamatan dalam mendukung pengembangan wilayah; 2) Menganalisis tipologi wilayah berdasarkan kapasitas sumberdaya.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive*. Kabupaten Blitar sebagai lokasi yang dipilih dalam penelitian ini, dengan pertimbangan bahwa sebagian besar Kabupaten Blitar merupakan wilayah pedesaan, serta merupakan salah satu Kabupaten yang sedang merintis Kawasan Pengembangan Agropolitan. Penelitian ini dilakukan pada 22 Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Penelitian dilakukan selama 2 bulan, yakni dari bulan April sampai dengan Mei 2014.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan derajat sumbernya adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini dikoleksi dari berbagai lembaga atau dinas antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Blitar dan dinas-dinas terkait (Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan) yang kemudian diekstraksi sesuai kebutuhan analisis.

Analisis Data

Dari data yang telah terkumpul kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian sehingga akan menjawab permasalahan yang diangkat. Beberapa metode analisis yang dipakai antara lain :

1. Analisis Hirarki Wilayah

a. Rasionalisasi

Data Fasilitas diubah menjadi data kapasitas dengan cara data jumlah fasilitas j pada wilayah i dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah i .

b. Pembobotan

Pembobotan dilakukan dengan membagi jumlah total kapasitas j dengan jumlah wilayah yang memiliki fasilitas j . Kemudian membagi data kapasitas j dengan bobot fasilitas j

c. Standarisasi

Standarisasi data dilakukan terhadap nilai baru dari data jarak dan fasilitas (bobot).

$$y_{ij} = \frac{x_{ij} - \min x_{ij}}{s_j}$$

d. Penjumlahan

Tahap terakhir adalah menjumlah nilai standarisasi

Kategori Kelas Hirarki :

Tinggi (Hirarki I) : $X > \text{mean} + 2(\text{Standar Deviasi IPK})$

Sedang (Hirarki II) : $\text{Mean} \leq X \leq 2(\text{Standar Deviasi IPK})$

Rendah (Hirarki III) : $X < \text{Mean}$

2. Analisis Tipologi Wilayah

Analisis tipologi wilayah dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kluster. Analisis Kluster dalam penelitian ini dilakukan dengan kombinasi antara kluster berhirarki dan non hirarki. Kluster berhirarki dilakukan untuk melihat jumlah kluster yang akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis kluster non hiererki, dengan melihat jarak terpanjang pada hasil dendogram. Analisis Kluster Hirarki dilakukan dengan metode Ward. Sedangkan analisis kluster non hirarki dilakukan dengan Metode K-Means. Metode K-Means adalah teknik algoritma untuk mengelompokkan item atau subjek penelitian menjadi K kluster dengan cara meminimalkan *Sum of Square* (SS) jarak dengan centroid kluster. Dalam metode K-Means harus ditentukan jumlah kluster terlebih dahulu. Pada penelitian ini penentuan jumlah kluster ditentukan dengan analisis hirarki yang dilakukan pada langkah sebelumnya (Sharma, 1996).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hirarki Wilayah

Penentuan hirarki didasarkan atas tingkat perkembangan dan kapasitas pelayanan yang dapat disediakan oleh suatu wilayah. Tingkat hirarki ini penting dalam penentuan kapasitas suatu wilayah, apakah suatu wilayah merupakan wilayah pusat/inti atau wilayah *hinterland*. Tingkat perkembangan kecamatan di Kabupaten Blitar ditentukan dengan metode skalogram yang dimodifikasi dan dicerminkan oleh nilai Indeks Perkembangan Kecamatan (IPK). Umumnya, semakin tinggi nilai IPK, maka semakin tinggi pula kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya. Sebaliknya, semakin rendah nilai IPK berarti semakin rendah kapasitas pelayanan suatu desa dan tingkat perkembangannya. Variabel yang digunakan dalam analisis skalogram secara umum dapat dibedakan menjadi empat variabel utama, yaitu : fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, fasilitas perekonomian, fasilitas kesehatan, fasilitas komunikasi dan transportasi, fasilitas air bersih, fasilitas sosial, dan fasilitas saprodi pertanian.

Nilai IPK yang dihasilkan berada pada kisaran 38,92 sampai 10,95 yang dapat dilihat secara rinci pada Tabel 2. Nilai IPK tertinggi sebesar 38,92 dimiliki oleh kecamatan dengan hirarki/orde pertama, yaitu Kecamatan Kademangan sedangkan nilai IPK terkecil sebesar 10,95 dimiliki oleh kecamatan dengan hirarki/orde ketiga, yakni Kecamatan Ponggok. Hasil perhitungan nilai IPK disajikan pada Tabel 2.

Berdasarkan hasil perhitungan skalogram, nilai IPK seluruh kecamatan yang tersebar di Kabupaten Blitar dikelompokkan ke dalam tiga hirarki pusat pelayanan sebagai berikut :

- a. Tingkat hirarki I (tinggi) merupakan wilayah kecamatan-kecamatan dengan tingkat perkembangan tinggi. Hanya terdapat 2 kecamatan yang termasuk dalam hirarki I.

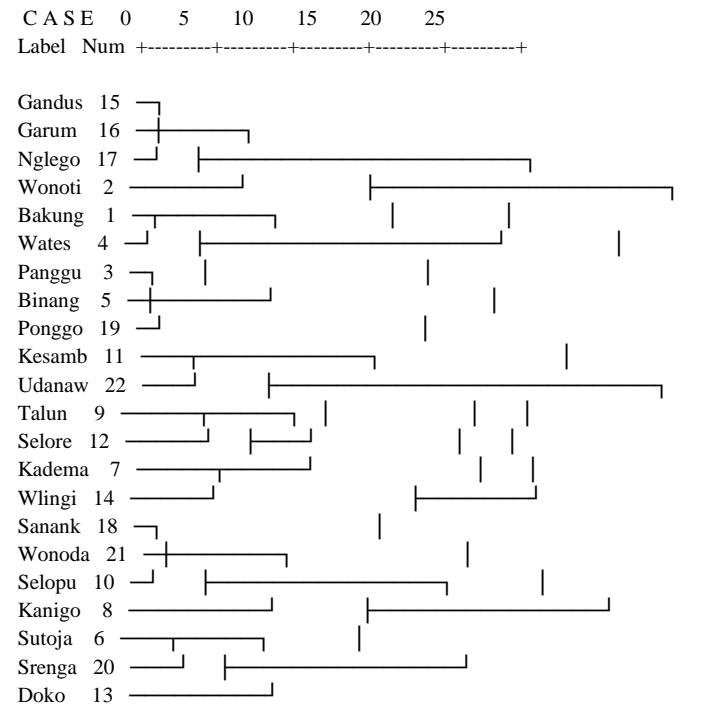
yaitu : Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Talun. Dua Kecamatan tersebut memiliki nilai IPK 38,92 untuk Kecamatan Kademangan dan 35,11 untuk Kecamatan Talun. Kecamatan-kecamatan dengan hirarki I umumnya memiliki ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan yang lebih tinggi, lebih lengkap, dan tentunya lebih memadai daripada kecamatan-kecamatan dengan hirarki yang lebih rendah (hirarki II dan III). Kecamatan yang termasuk dalam hirarki I memiliki kecenderungan terkonsentrasi pada jalur utama di Kabupaten Blitar. Kondisi tersebut terjadi karena jalur utama merupakan lokasi yang paling strategis dalam kaitannya dengan aliran orang, barang, maupun jasa. Semakin banyak aktivitas orang, barang, maupun jasa maka membutuhkan fasilitas umum dalam menunjang aktivitas tersebut. Sehingga tidak salah apabila kawasan di sekitar jalur utama lebih berkembang dibandingkan kawasan yang tidak dilalui jalur utama.

- b. Tingkat hirarki II (sedang) merupakan wilayah kecamatan-kecamatan dengan tingkat perkembangan sedang. Terdapat 7 kecamatan yang termasuk dalam hirarki II, yaitu : Kecamatan Wates, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Srengat, Kecamatan Wonodadi, dan Kecamatan Udanawu. Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam tingkat hirarki ini memiliki IPK antara 29,71 – 20,32. Adapun wilayah kecamatan-kecamatan dengan tingkat hirarki II mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
 - i. Ketersediaan sarana dan prasarana di wilayah tersebut lebih sedikit dari hirarki I.
 - ii. Umumnya letaknya berada di pinggir wilayah berhirarki I dengan tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan wilayah di hirarki I.
- c. Tingkat hirarki III (rendah) merupakan wilayah kecamatan-kecamatan dengan tingkat perkembangan rendah. Terdapat 13 kecamatan yang termasuk dalam hirarki III, yaitu : Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Binangun, Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Sanankulon, dan Kecamatan Ponggok. Kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam tingkat hirarki ini memiliki IPK antara 20,05-10,95 dengan rata-rata 15,13. Kecamatan-kecamatan pada tingkat hirarki III pada umumnya memiliki tingkat kehidupan yang relatif kurang maju dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang termasuk ke dalam tingkat hirarki yang lebih tinggi. Adapun wilayah kecamatan-kecamatan dengan tingkat hirarki III mempunyai ciri-ciri ketersediaan sarana dan prasarana di kecamatan-kecamatan tersebut relatif kurang.

Pada dasarnya, untuk fasilitas-fasilitas tertentu dengan kapasitas pemenuhan kebutuhan yang lebih kompleks, kecamatan-kecamatan dengan tingkat hirarki yang lebih rendah masih harus mengaksesnya di kecamatan-kecamatan dengan tingkat hirarki yang lebih tinggi. Oleh karena itu, umumnya letak kecamatan-kecamatan yang berhirarki lebih rendah berlokasi di sekitar atau pinggir kecamatan-kecamatan dengan tingkat hirarki yang lebih tinggi.

Tipologi Wilayah

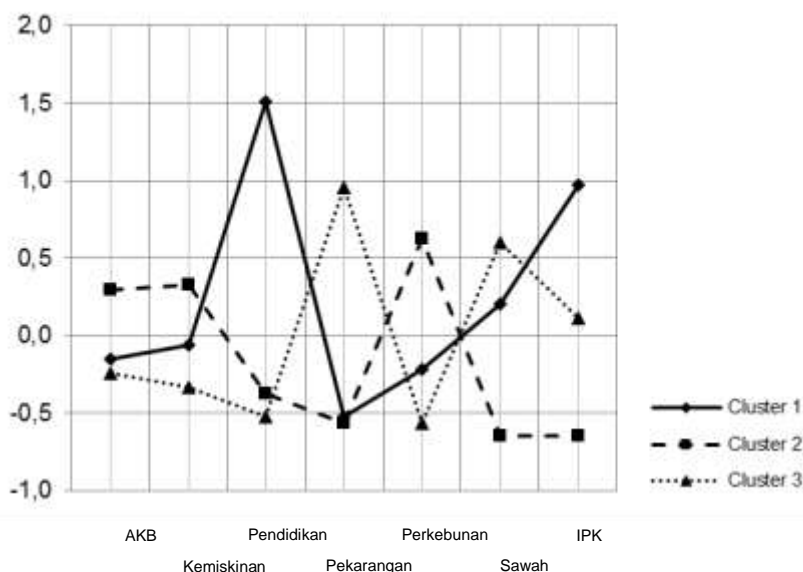
Dendogram seperti tertera pada Gambar 1 menggambarkan proses pembentukan gerombol yang dinyatakan dalam bentuk gambar. Selanjutnya untuk menetapkan jumlah kelompok optimum, maka dapat dilakukan dengan mengamati jarak terpanjang pada *linkage distance* dari satu pautan ke pautan berikutnya. Dari hasil tersebut dapat ditentukan bahwa klaster untuk analisis non hirarki yang terbaik menggunakan tiga klaster.



Gambar 1. Dendogram Analisis Klaster Berhirarki

Setelah dilakukan tahap analisis gerombol berhirarki maka tahap selanjutnya dilakukan analisis gerombol tidak berhirarki. Berdasarkan analisis gerombol berhirarki diputuskan bahwa tiga gerombol merupakan yang terbaik sehingga pada tahap analisis gerombol tidak berhirarki ditetapkan kecamatan-kecamatan di wilayah studi dikelompokkan menjadi tiga gerombol (klaster).

Hasil analisis gerombol tidak berhirarki dapat menunjukkan pola perbedaan karakteristik antara ketiga gerombol melalui grafik nilai tengah dari setiap faktor utama untuk masing-masing kelompok kecamatan di Kabupaten Blitar. Nilai tertinggi atau terendah tiap faktor utama akan menjadi penciri atau karakter untuk masing-masing gerombol di Kabupaten Blitar seperti terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Grafik Plotting Hasil Analisis Kluster K-means

Berdasarkan *plotting* nilai tengah masing-masing kluster (Gambar 2), penciri yang signifikan pada Kluster 1 terdiri dari : Angka Kematian Bayi (AKB) sedang, Tingkat Kemiskinan Sedang, Tingkat Pendidikan yang tinggi, Rasio Luas pekarangan dan bangunan sedang, Rasio Luas areal perkebunan sedang, dan Luas areal sawah sedang. Sedangkan jika dilihat dari fasilitas yang dimiliki atau Sumberdaya Buatan (SDB), Kluster 1 adalah yang tertinggi. Kluster 1 terdiri dari 5 kecamatan atau sekitar 27,73 persen dari seluruh jumlah kecamatan di Kabupaten Blitar.

Kluster 2 memiliki dua penciri utama yang signifikan, yaitu : Angka Kematian Bayi (AKB) Tinggi, Tingkat kemiskinan tinggi, Tingkat Pendidikan Sedang, Luas areal pekarangan dan sawah rendah, sedangkan luas areal perkebunan tinggi. Sedangkan jika dilihat dari Fasilitas yang dimiliki/Sumberdaya Buatan (SDB), Kluster 2 masuk dalam katategori rendah. Kecamatan-kecamatan pada Kluster 2 ada sebanyak 9 kecamatan atau sekitar 40,91 persen dari seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar.

Penciri utama yang signifikan untuk Kluster 3 meliputi : Angka Kematian Bayi (AKB) rendah, Kemiskinan rendah, Tingkat Pendidikan Rendah, Luas Areal Pekarangan tinggi, Luas Areal Perkebunan rendah, dan Luas Areal Sawah tinggi. Sedangkan jika dilihat dari Fasilitas yang dimiliki/Sumberdaya Buatan (SDB), Kluster 3 masuk dalam kategori sedang. Kluster 3 terdiri dari 8 kecamatan atau sekitar 36,36 persen dari seluruh jumlah kecamatan di Kabupaten Blitar. Karakteristik pada masing-masing Kluster merupakan karakteristik pada masing-masing tipologi

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan serta kaitannya dengan tujuan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Blitar memiliki tiga klaster dengan tingkat hirarki tinggi, sedang, dan rendah. Pembagian kedalam tiga klaster tersebut berdasarkan pada penciri utama pada tipologi wilayah berdasarkan kapasitas sumberdaya yang dimiliki pada masing-masing wilayah di Kabupaten Blitar. Tipologi dimaksud antara lain; Klaster 1 adalah wilayah berbasis pertanian sawah dengan tingkat perkembangan kecamatan dan kondisi pendidikan yang tinggi. Adapun Kecamatan yang termasuk dalam Klaster 1 adalah Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Udanawu dan Kecamatan Wlingi; Klaster 2 adalah wilayah berbasis perkebunan dengan tingkat perkembangan kecamatan yang rendah. Adapun Kecamatan yang termasuk dalam Klaster 2 adalah Kecamatan Bakung, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Wates, Kecamatan Binangun, Kecamatan Doko, Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok; Klaster 3 adalah wilayah berbasis pertanian lahan sempit atau pekarangan dengan tingkat perkembangan kecamatan sedang. Adapun Kecamatan yang termasuk dalam Klaster 3 adalah Kecamatan Kanigoro, Kecamatan Talun, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Selorejo, Kecamatan Sanankulon, Kecamatan Srengat, Kecamatan Ponggok, Kecamatan Wonodadi. Melakukan kebijakan pembangunan berdasarkan pada tipologi wilayah yang telah dikelompokkan menjadi tiga klaster.

REFERENSI

- Rustiadi, E. dan Hadi, S. 2006. *Pengembangan Agropolitan Sebagai Strategi Pembangunan Pedesaan dan Pembangunan Berimbang*. Bogor: Crespent Press.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., dan Panuju, D.R. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sharma, S. 1996. *Applied Multivariate Techniques*. The United States of America: John Wiley and Sons, Inc.
- Tarigan, R. 2009. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Terjemahan oleh Haris Munandar, 2006. Jakarta: Penerbit Erlangga.